

**KAJIAN ALIH FUNGSI LAHAN
DI KECAMATAN JUNREJO, KOTA BATU**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Sebutan
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Oleh :

ATHA WINA CLARISSA PUTRI

NIT.19283140

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRACT

The increase of development that continues, especially in the housing sector and the tourism industry in Junrejo District, Batu City, causing the area of agricultural land to continue to decrease every year and non-agricultural land to increase. The development of the tourism and housing industry in Junrejo District is the result of land conversion activities into non-agricultural land which can affect agricultural land that produces food for the local population and its surroundings. For this reason, the purpose of this study was to determine the suitability of land conversion to the directions of the Junrejo RTRW and the factors that influence the occurrence of land conversion in Junrejo District based on the views of the community. The method used in this study is a mixed method.

The results of this study indicate that the level of land conversion in 2019-2023 reached 6.03% or an area of 185.14 ha of the total area of Junrejo District with a suitability level for the RTRW reaching 29.6% or 54.47 ha; supports the RTRW directives reaching 56.94% or 104.78 ha; and the non-conformity of land use change reached 13.46% or 24.77 ha which was dominated by the use of sparse village land in the direction of food crop areas. Then, the factors causing the conversion of agricultural land to non-agriculture in Junrejo District, including: (1) lack of interest in agricultural activities; (2) housing needs; (3) inadequate facilities and infrastructure; (4) low education level; (5) high development activity; (6) high land prices; (7) there are job options outside the agricultural sector (8) housing needs; and (9) lack of public knowledge of government policies regarding land conversion. This happened because the economic conditions of the farmer households were quite low prior to the conversion of agricultural land.

Keywords: *Land Conversion, Land Use, RTRW, Sustainability*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRACT.....	viii
INTISARI.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Pembatasan Masalah	5
C. Perumusan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Kajian Literatur	7
B. Kerangka Teoritis	12
C. Kerangka Pemikiran	23
D. Pertanyaan Penelitian	25

BAB III METODE PENELITIAN.....	26
A. Format Penelitian	26
B. Lokasi dan Objek Penelitian	27
C. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel	27
D. Definisi Operasional Konsep dan Variabel.....	28
E. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	29
F. Teknik Pengumpulan Data.....	32
G. Teknik Analisis Data.....	33
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH KECAMATAN JUNREJO	35
A. Letak, Luas, dan Batas Wilayah.....	35
B. Kondisi Demografi.....	36
C. Kondisi Sosial dan Ekonomi.....	40
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Kesesuaian Alih Fungsi Lahan Terhadap RTRW	42
B. Faktor Penyebab Terjadinya Alih Fungsi Lahan Pertanian	55
C. Rekomendasi Pengendalian Alih Fungsi Lahan.....	66
BAB VI PENUTUP	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN.....	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penelitian ini mengkaji alih fungsi lahan di Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Fokus penelitian meliputi: (1) kesesuaian alih fungsi lahan tahun 2019-2023 terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu; dan (2) faktor penyebab terjadinya alih fungsi lahan menurut masyarakat setempat. Kemudian, dari hasil tersebut disimpulkan dengan memberikan rekomendasi untuk mengendalikan alih fungsi lahan di Kecamatan Junrejo.

Alih fungsi lahan atau lahan konversi adalah sebuah perubahan dari sebagian atau semua fungsi lahan dengan rencana awal suatu wilayah yang mempengaruhi aspek lingkungan dan kemampuan wilayah (Utomo *et al.* 1992, Prabowo *et al.* 2020), secara bertahap dengan jangka waktu yang berbeda (Wahyunto *et al.* 2001 dalam Rezki Sarihi *et al.* 2020). Menurut pendapat lain, alih fungsi lahan adalah hasil kegiatan manusia dalam mengelola kekayaan alam dengan aktivitas fisik, sosial, ekonomi (Jaya *et al.* 2021), budaya dan politik secara dinamis (Prayitno *et al.* 2021).

Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian merupakan permasalahan yang dialami setiap wilayah yang sedang berkembang (Azadi *et al.* 2018). Hal tersebut merupakan konsekuensi dari pembangunan dan pertumbuhan jumlah penduduk suatu daerah karena kebutuhan terhadap lahan meningkat. Kebutuhan lahan yang meningkat membuat ketersediaan lahan menjadi terbatas dan semakin sulit untuk didapat. Misalnya, di Italia terjadi penyusutan lahan pertanian pada wilayah pinggiran kota karena terbatasnya lahan dan sektor pertanian dianggap memiliki profitabilitas yang rendah sehingga rentan untuk dialihfungsikan (Mazzocchi *et al.* 2015). Lalu, di China, pembangunan pada sektor ekonomi dan sektor industri yang tidak terkontrol membuat alih fungsi lahan pertanian masif terjadi karena urbanisasi ke daerah sekitar industri dan ekonomi berlangsung (Jiang & Zhang 2016).

Dalam perkembangan pembangunan di Indonesia terjadi alih fungsi lahan yang masif di berbagai daerah dan umumnya terjadi pada lahan pertanian (Jaya *et al.* 2021). Hal tersebut berawal dari ledakan ekonomi pada tahun 1980 hingga 1990 pasca terjadi pembangunan fisik berskala besar di kota-kota besar yang saat ini dikenal kota metropolitan yang menyebabkan pembukaan lahan secara besar-besaran untuk lahan permukiman (Fajarini, 2015 dalam Jaya *et al.* 2021). Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS, 2021) dalam Direktorat Jenderal Tanaman Pangan (2022) menyatakan bahwa tingkat alih fungsi pada lahan pertanian nasional mencapai 60.000 hingga 80.000 ha per tahun dengan perkiraan akan terus meningkat. Sesuai dengan hal tersebut, peningkatan alih fungsi lahan dapat mengancam ketersediaan pangan akibat tidak seimbangnya pertumbuhan sektor pertanian dengan pembangunan pada sektor non pertanian. Hal ini dapat terjadi karena dalam aktivitas hidupnya, manusia membutuhkan lahan yang dapat menghasilkan nilai lebih dibandingkan dengan pemanfaatan lahan sebelumnya. Di sisi lain, pertumbuhan penduduk terus meningkat dan kebutuhan ketersediaan lahan seperti permukiman, tempat usaha, sarana dan prasarana juga meningkat (Prayitno *et al.* 2021). Beberapa alasan ini seringkali menjadi alasan pemilik lahan melakukan alih fungsi lahan.

Menurut hasil penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa ahli, penyebab alih fungsi lahan, yaitu: (1) Dinamika struktur ekonomi dan karakteristik demografi pada wilayah yang ditandai dengan berkembangnya sektor pembangunan daerah (Gultom *et al.* 2021); (2) Lebih rendahnya nilai lahan pertanian dibandingkan dengan lahan non pertanian (Prayitno *et al.* 2021, Gultom *et al.* 2021); (3) Lokasi lahan pertanian berada diantara lahan non pertanian (Gultom *et al.* 2021); (4) Peningkatan kebutuhan lahan permukiman (Gultom *et al.* 2021, Prayitno 2020); (5) Pengembangan lokasi permukiman dan industri yang dilakukan pengembang/investor (Jaya *et al.* 2021); (6) Peningkatan harga tanah yang dilakukan oleh investor (Rondhi *et al.* 2018); dan (7) Para pemuda yang tidak tertarik untuk mengolah lahan pertanian (Gultom *et al.* 2021). Beberapa hal tersebut dapat mempengaruhi

ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dengan perencanaan ruang dalam suatu wilayah dan apabila tidak segera ditangani dapat menyebabkan masalah dalam penataan ruangnya.

Dengan tujuan mengendalikan alih fungsi lahan yang semakin tidak terkendali, pemerintah negara-negara di Eropa menetapkan suatu kebijakan guna memperhatikan kegiatan alih fungsi lahan pada suatu wilayah demi mencegah timbulnya masalah yang lebih kompleks, seperti: *Common Agricultural Policy (CAP)* dan *Least Favoured Area (LFA) Policy*. Kebijakan tersebut mengatur perubahan lahan pertanian dan pembangunan perkotaan berupa: bantuan dalam produksi pertanian, penghapusan hambatan terkait perdagangan hasil pertanian dan kebijakan ekonomi. Hal ini membuat sektor pertanian di negara-negara Eropa sangat bergantung pada dukungan kebijakan pemerintah (Ustaoglu & Williams 2023). Sementara itu, dalam mengendalikan alih fungsi lahan, pemerintah di Indonesia telah menetapkan beberapa kebijakan, diantaranya: (1) Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; (2) Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Lahan Pertanian Berkelanjutan; dan (3) Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.

Salah satu kebijakan tentang pengendalian alih fungsi lahan pertanian di Indonesia adalah Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Kebijakan ini berupa perlindungan lahan pertanian guna mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Selain itu, terdapat kebijakan pengendalian alih fungsi lahan, yakni Lahan Sawah yang Dilindungi yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. Kebijakan ini berupa penetapan lahan sawah yang dilindungi sebagai upaya melindungi lahan sawah dan ketersediaanya guna mendukung ketahanan pangan nasional. Namun, proses alih fungsi lahan pertanian masih kerap terjadi meski telah ditetapkan kebijakan tersebut. Hal itu disebabkan pemilik lahan memiliki kekuasaan dalam pengelolaan dan pemanfaatan lahan

miliknya yang mana membuat kegiatan alih fungsi lahan sulit untuk dikontrol kendatipun telah ada kebijakan tentang pengendalian alih fungsi lahan.

Salah satu kota yang sedang dan telah mengalami alih fungsi lahan pertanian adalah Kota Batu. Tidak berbeda dengan wilayah lainnya, luas lahan pertanian Kota Batu selalu mengalami penurunan setiap tahunnya dan lahan non pertanian seperti industri pariwisata, perdagangan dan perumahan terus meningkat (Prayitno 2020). Hal ini terjadi diakibatkan oleh peningkatan jumlah penduduk dan pertumbuhan kegiatan ekonomi terutama pada sektor perumahan dan industri pariwisata. Kegiatan industri pariwisata di kota ini telah menyumbang pertumbuhan industri pariwisata nasional (Dwi H 2015, Amini 2020). Namun, adanya industri pariwisata mempengaruhi juga peningkatan aktivitas alih fungsi lahan pertanian untuk mendukung industri pariwisata seperti: infrastruktur, hotel, swalayan, dan lain sebagainya. Hal tersebut tidak dapat dihindari dan dapat mengancam produksi pangan masyarakat sebab penyusutan luas lahan pertanian meningkat dan jumlah petani terus menurun yang (Tjahja *et al.* 2019 dalam Prayitno 2020).

Kota Batu memiliki salah satu kecamatan di yang paling berpotensi dalam penyediaan pangan, yakni Kecamatan Junrejo. Kecamatan ini memiliki lahan pertanian paling luas di Kota Batu. Namun, dari tahun ke tahun telah terjadi penyusutan luas lahan pertanian. Berdasarkan Badan Pusat Statistik Kota Batu tahun 2019 luas lahan sawah di Kecamatan Junrejo mencapai 1.028 ha, sedangkan di tahun 2021 tercatat lahan sawah di Kecamatan Junrejo seluas 641,2 ha dari total luas penggunaan lahan di Kecamatan Junrejo. Penurunan luas lahan pertanian di Kecamatan Junrejo mencapai 37,6% dengan luas 386,8 ha telah beralih fungsi yang mana sangat mengkhawatirkan sebab lahan sawah merupakan sumber penyedia pangan dan jika alih fungsi terus terjadi dapat mengancam ketersediaan pangan.

Berdasarkan uraian di atas, perlu diteliti kesesuaian alih fungsi lahan terhadap RTRW Kota Batu karena terjadinya alih fungsi lahan dapat menyebabkan ketidaksesuaian lahan terhadap arahan pemanfaatan ruang dan dapat timbul masalah yang lebih kompleks jika tidak segera dilakukan

pengendalian alih fungsi lahan. Serta, faktor penyebab alih fungsi lahan menurut masyarakat pemilik lahan sebagai dasar pengendalian alih fungsi lahan. Peneliti perlu untuk mengkaji dengan judul '**Kajian Alih Fungsi Lahan di Kecamatan Junrejo, Kota Batu.**'

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disusun rumusan masalah, diantaranya:

1. Bagaimana kesesuaian alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian di Kecamatan Junrejo dengan RTRW Kota Batu?
2. Apa faktor penyebab terjadinya alih fungsi lahan menurut masyarakat di Kecamatan Junrejo, Kota Batu?

C. Pembatasan Masalah

Beberapa batasan permasalahan dalam penelitian ini terkait fokus dan objek yang dibahas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Fokus penelitian ini adalah kesesuaian alih fungsi lahan pertanian Kecamatan Junrejo dengan kebijakan RTRW di Kota Batu dan faktor penyebab terjadinya alih fungsi lahan menurut masyarakat.
2. Objek kajian yang dipilih merupakan lahan pertanian yang telah beralih fungsi menjadi lahan terbangun (non pertanian) dari tahun 2019 hingga 2023.
3. Peta RTRW yang digunakan adalah peta yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2022-2042 pada tanggal 26 Desember 2022.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada, tujuan penelitian ini ialah untuk:

- a. Mengetahui kesesuaian alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian dengan RTRW di Kecamatan Junrejo, Kota Batu;
- b. Mengetahui faktor penyebab terjadinya alih fungsi lahan menurut masyarakat di Kecamatan Junrejo, Kota Batu; dan

- c. Memberikan rekomendasi upaya yang dapat dilakukan guna mengendalikan alih fungsi lahan pertanian di Kecamatan Junrejo, Kota Batu.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian secara teoritis dan praktis, yaitu:

- a. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberi sumbangsih terhadap pengembangan ilmu pengetahuan tentang alih fungsi lahan, yakni mengenai kesesuaiannya terhadap kebijakan RTRW, serta faktor yang menyebabkan hal itu dapat terjadi menurut masyarakat. Hasil penelitian dapat dimanfaatkan sebagai referensi bagi para akedemisi dan praktisi di bidang ilmu tanah atau bidang lainnya.
- b. Secara praktis, penelitian ini dapat merekomendasikan atau menyarankan upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam mengendalikan kegiatan alih fungsi lahan dan memberi edukasi masyarakat setempat ataupun di wilayah lain.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat alih fungsi lahan tahun 2019-2023 mencapai 6,03% atau seluas 185,14 ha dari total luas wilayah Kecamatan Junrejo dengan tingkat kesesuaian terhadap RTRW mencapai 29,6% atau 54,47 ha; mendukung arahan RTRW mencapai 56,94% atau 104,78 ha; dan ketidaksesuaian alih fungsi lahan mencapai 13,46% atau 24,77 ha yang didominasi oleh penggunaan lahan kampung jarang pada arahan kawasan tanaman pangan.
2. Faktor penyebab alih fungsi lahan di Kecamatan Junrejo, diantaranya: (1) kurangnya minat dalam kegiatan pertanian; (2) kebutuhan tempat tinggal; (3) sarana dan prasarana yang kurang memadai; (4) tingkat pendidikan yang rendah; (5) aktivitas pembangunan yang tinggi; (6) harga lahan yang tinggi; (7) terdapat pilihan pekerjaan diluar sektor pertanian (8) kebutuhan tempat tinggal; dan (9) kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah mengenai alih fungsi lahan. Hal tersebut terjadi sebab kondisi pekeconomian rumah tangga petani cukup rendah sebelum melakukan alih fungsi lahan pertanian.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat disampaikan peneliti, yaitu:

1. Peneliti selanjutnya dapat membahas lebih lanjut mengenai alih fungsi lahan di Kecamatan Junrejo melalui kebijakan LSD dan LP2B.
2. Pemerintah Daerah Kota Batu melalui Pemerintah Kecamatan Junrejo perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pengendalian alih fungsi lahan.
3. Pemerintah Kota Batu perlu melakukan percepatan penetapan lokasi penetapan LP2B dan pemberian insentif kepada petani untuk mengendalikan alih fungsi lahan, serta penguatan sanksi bagi pelaku alih fungsi lahan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arikunto, S 2013, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi
Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik Kota Batu 2019, 'Kecamatan Junrejo Dalam Angka 2019,' ,
pp. 1–171.
- Badan Pusat Statistik Kota Batu 2020, 'Kecamatan Junrejo Dalam Angka 2020,' ,
pp. 1–171.
- Badan Pusat Statistik Kota Batu 2022, 'Kecamatan Junrejo Dalam Angka 2022,' ,
pp. 1–171.
- Hardani, H 2020, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif / Yogyakarta : CV
Pustaka Ilmu Grup*.
- Margono, M 2004, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Rineka Cipta.
- Ritohardoyo, R 2013, *Penggunaan Dan Tata Guna Lahan*, Yogyakarta: Penerbit
Ombak.
- Rusmini 2017, *Metode penelitian: teori dan aplikasi penelitian kualitatif,
kuantitatif, mixed methods, serta research & development*.
- Sartohadi, J., Jamulya, & Nur Indah, S. D. (2012). *Pengantar Geografi Tanah*.
Pustaka Pelajar.
- Sudrajat, S 2015, *Mengenal Lahan Sawah dan Memahami Multifungsinya Bagi
Manusia dan Lingkungan*, Gadjah Mada University Press.
- Sukamdi 2012, 'Konsep Dasar, Pengertian, dan Teori Kependudukan,'
Universitas Terbuka, pp. 1–43.
- Sutaryono, Rakhmat Riyadi, SW 2020, *Tata Ruang dan Perencanaan Wilayah
Implementasi dalam Kebijakan Pertanahan*.
- Vink, AP. 1976, *Land Use in Advancing Agriculture*.

Jurnal

- Amini, AH 2020, 'Analisis total economic value perkembangan pariwisata di kota
batu (studi kasus di desa wisata bumiaji),' *Jurnal Ilmiah*, vol. 9, no. 1,
pp. 3–15, <<https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/6916>>
- Aris, N *et al.* 2021, 'Analisis kesesuaian penggunaan lahan terhadap rtrw

- menggunakan jurnal geodesi undip januari 2021,' , pp. 133–142.
- Azadi, H *et al.* 2018, 'Agricultural land conversion: Reviewing drought impacts and coping strategies,' *International Journal of Disaster Risk Reduction*, vol. 31, pp. 184–195.
- Damanik, JA 2014, 'Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan petani padi di kecamatan masaran, kabupaten sragen,' *Economics Development Analysis Journal*, vol. 3, no. 1, pp. 212–224.
- Destianto, R & Pigawati, B 2014, 'Analisis keterkaitan perubahan lahan pertanian terhadap ketahanan pangan kabupaten magelang berbasis model spatio temporal sig,' *Geoplanning: Journal of Geomatics and Planning*, vol. 1, no. 1, pp. 21–32.
- Dharmadiatmika, IMA 2016, 'Faktor-faktor pemilihan lokasi dan sebaran minimarket waralaba di kecamatan denpasar barat,' *Ruang*, vol. 3, no. 3, pp. 291–304, <<https://www.researchgate.net/profile/Agus-Dharmadiatmika/publication/327743598>>.
- Dwi H, C 2015, 'Strategi pemasaran obyek wisata daerah untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara (studi pada dinas pariwisata dan kebudayaan kota batu),' *Pemasaran Ekonomi*, vol. 3, no. 2, pp. 1689–1699.
- Faisal, M 2020, 'Land conversion and the level of community social cohesion in the sub-district of empoang district binamu jenepono regency,' *Sosiohumaniora*, vol. 22, no. 2, pp. 198–205.
- Fitriyanto, AM, Tjahjono, H, & Suhandini, P 2013, 'Evaluasi Penggunaan lahan terhadap rencana tata ruang wilayah kota semarang tahun 2011-2031 (untuk kecamatan genuk, pedurungan, dan gayamsari),' *Geo Image*, vol. 2, no. 2, pp. 43–49.
- Gultom, OB *et al.* 2021, 'Repercussions of agricultural land conversion policy on food security in Indonesia,' *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, vol. 782, no. 3.
- Hambali, FR, Sutaryono, S, & Pinuji, S 2021, 'Kesesuaian kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan rencana tata ruang wilayah di

- kabupaten sumenep,' *Tunas Agraria*, vol. 4, no. 3, pp. 276–292.
- Harun, P 2020, 'Perubahan demografi dan pertumbuhan ekonomi : bukti empiris kasus indonesia,' *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Perbankan (Journal of Economics, Management and Banking)*, vol. 5, no. 3, p. 161.
- Hastuty, S 2017, 'Identifikasi faktor pendorong alih fungsi lahan pertanian,' *Jurnal Prosiding Seminar Nasional*, vol. 03, no. 01, pp. 253–257.
- Jaya, B *et al.* 2021, 'Land conversion and availability of agricultural land in 2035 in Puncak Area Bogor Regency,' *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, vol. 694, no. 1.
- Jiang, L & Zhang, Y 2016, 'Modeling urban expansion and agricultural land conversion in Henan province, China: An integration of land use and socioeconomic data,' *Sustainability (Switzerland)*, vol. 8, no. 9.
- Maharani, M & Kuncoro, H 2019, 'Analisis pengaruh jumlah dan sebaran ground control point (gcp) dalam proses ortorektifikasi citra satelit resolusi tinggi (csrt),' *ITB Indonesian Journal of Geospatial*, vol. 05, no. 2, pp. 51–62.
- Mazzocchi, C *et al.* 2015, 'Land use change and agriculture role in managing green spaces: a methodology for land use change analyses,' *Aestimum*, vol. 0, no. 0, pp. 247–255, <<http://www.fupress.net/index.php/ceset/article/view/17895>>.
- Nugroho, N, Sudarsono, B, & Sabri, L 2021, 'Analisis kesesuaian penggunaan lahan terhadap rtrw menggunakan sig,' *Jurnal Geodesi Undip*, hh. 133–142.
- Panjaitan, Andri; Sudarsono, Bambang; Bashit, N 2019, 'Analisis kesesuaian penggunaan lahan terhadap rencana tata ruang wilayah (rtrw) Di Kabupaten Cianjur Menggunakan Sistem Informasi Geografis,' *Jurnal Geodesi Undip*, vol. 8, no. 1, pp. 248–257.
- Perkasa, D, Istiqomah, DA, & Aisiyah, N 2022, 'Kesesuaian penggunaan lahan terhadap rencana tata ruang wilayah di kecamatan syamtalira aron kabupaten aceh utara,' *Widya Bhumi*, vol. 2, no. 2, pp. 152–165.
- Prabowo, R, Bambang, AN, & Sudarno 2020, 'Pertumbuhan penduduk dan alih fungsi lahan pertanian,' *Mediagro*, vol. 16, no. 2, pp. 26–36.

- Prayitno, G 2020, 'Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Non Pertanian Di Kota,' *GEOGRAPHY*, vol. 8, no. 2. doi: 10.31764/geography.v8i2.2653.
- Prayitno, G *et al.* 2021, 'Place attachment and agricultural land conversion for sustainable agriculture in Indonesia,' *Heliyon*, vol. 7, no. 7, p. e07546, <<https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07546>>.
- Rahmadi, E, Dewi, C, Anissa, R, & Fajriyanto 2023, 'Kesesuaian penggunaan lahan di kota metro terhadap pola ruang,' *Geoid*, vol. 18, no. 2, p. 237.
- Rezki Sarihi, Y, Tilaar, S, & M. Rengkung, M 2020, 'Analisis penggunaan lahan di pulau ternate,' *Spasial*, vol. 7, no. 3, pp. 259–268.
- Rondhi, M *et al.* 2018, 'Agricultural land conversion, land economic value, and sustainable agriculture: A case study in East Java, Indonesia,' *Land*, vol. 7, no. 4.
- Siregar, NA & Ritonga, Z 2019, 'Analisis tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan terhadap kesejahteraan sosial di kabupaten labuhanbatu,' *Jurnal Informatika*, vol. 6, no. 1, pp. 1–10.
- Subroto, G & Susetyo, C 2016, 'Identifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi penentuan lahan pertanian pangan berkelanjutan di kabupaten jombang, jawa timur,' *Jurnal Teknik ITS*, vol. 5, no. 2.
- Sutaryono, S 2023, 'Lahan sawah dilindungi,' *SKH Kedaulatan Rakyat*, hh 1.
- Ustaoglu, E & Williams, B 2023, 'Institutional settings and effects on agricultural land conversion: a global and spatial analysis of european regions,' *Land*, vol. 12, no. 1.

Skripsi

- Fauzan, F 2022, 'Tinjauan Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Non Pertanian Di Desa Bumiaji Kota Batu,' Skripsi Pada Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
- Nahak, TD 2016, 'Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Kawasan Pariwisata Berbasis Good Governance Dalam Mewujudkan Tertib Tata Ruang (Studi Di Kota Batu Jawa Timur),' Skripsi Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Brawijaya.

Septyovika, FR 2022, 'Kajian Alih Fungsi Lahan Pertanian Pada Masyarakat Minangkabau Di Kecamatan Kuranji, Kota Padang,' Skripsi Pada Program Studi Geografi Universitas Gadjah Mada.

Ridwansyah, RA 2021, 'Sektor Pertanian (Studi Kasus Kesesuaian Kebijakan Terhadap Alih Fungsi Lahan Di Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu),' Skripsi Pada Program Studi Agribisnis Universitas Muhammadiyah Malang.

Website

Badan Pusat Statistik Kota Batu, 2019, *Total Luas Penggunaan Lahan Menurut Kecamatan di Kota Batu Ha Tahun 2019*, dilihat pada tanggal 28 Maret 2023, <https://batukota.bps.go.id/statictable/2020/05/14/729/total-luas-penggunaan-lahan-menurut-kecamatan-di-kota-batu-ha-2019.html>

Badan Pusat Statistik Kota Batu, 2021, *Total Luas Penggunaan Lahan Sawah Menurut Kecamatan di Kota Batu (Ha) Tahun 2021*, dilihat pada tanggal 28 Maret 2023, <https://batukota.bps.go.id/statictable/2022/03/16/1092/total-luas-penggunaan-lahan-sawah-menurut-kecamatan-di-kota-batu-ha-2021.html>

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, 2022, Menggenjot Indeks Pertanaman Padi Nasional, dilihat pada 26 Juli 2023, <https://tanamanpangan.pertanian.go.id/detil-konten/iptek/74>

Food and Agriculture Organization of the United Nations, 1976, *A framework for land evaluation. Soils bulletin 32*, Rome, Italy, dilihat pada tanggal 29 Maret 2023, <https://www.fao.org/3/x5310e/x5310e00.html>

Food and Agriculture Organization, 1989, *Sustainable development and natural resources management. Conference Twenty-fifth Session*, dilihat pada tanggal 29 Maret 2023, <https://www.fao.org/bodies/conf/c89/en/>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah dan Tim Pelaksanaan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kota Batu.

Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu Tahun 2022-2042.